

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
Jalan Yos Sudarso Tlp. (0481) 22222



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2020 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahunberjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
Bab V : Penutup.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I : Dinas Pendidikan
Lampiran II : Dinas Kesehatan

Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah

Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan RKPD Tahun 2022.

Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 48

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala hikmah yang tercurah di balik setiap kerja keras kita. Semoga semua sumber daya yang telah diberikan dapat senantiasa mendapat limpahan rahmat dan ridha-Nya. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 selain berisi tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan sumber dana / pembiayaan juga memuat tentang evaluasi kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2020).

Akhirnya, setelah berencana dan menyandarkan harapan semoga semua program berjalan dan sasaran dapat tercapai. Insya Allah.

Watampone, 21 Juni 2021

Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan Kabupaten Bone



ABARSUKI, S.Sos
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19700906 199303 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... i

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 1

 1.3. Maksud dan Tujuan..... 4

 1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II..... 6

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12

 2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 16

 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 17

 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 21

BAB III 23

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 23

 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 23

 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 23

 3.3. Program dan Kegiatan..... 28

BAB IV 33

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 33

 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 33

BAB V 34

PENUTUP..... 34

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone, maka setiap tahunnya perlu disusun Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi “RenjERANGKAT DAERAH adalah merupakan penjabaran dari Renstra-PERANGKAT DAERAH yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya”.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone meliputi tahap persiapan penyusunan Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja), Pelaksanaan Forum PERANGKAT DAERAH dan penetapan Rencana Kerja (Renja). Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) ini adalah bagian dari perencanaan yang diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dapat maksimal dan menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan, skala prioritas dan penetapan Alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Adapun keberhasilan dan tidaknya Rencana Kerja ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undangl-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan RKPD tahun 2019;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 06 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Kabupaten Bone;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019, Nomor 3);
37. Peraturan Bupati Bone Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
38. Peraturan Bupati Bone Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019;
39. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone 2019, Nomor 17);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang prioritas pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah kongkrit kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bone.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana ;

2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/ kegiatan selama 1 tahun oleh Perangkat Daerah ;
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/ kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya;
4. Memberi arah dan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf, agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab;
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang ;
6. Mewujudkan visi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam memberikan pelayanan yang terbuka, optimal dan prima.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I	: PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	: HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	: PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan amanat konstitusi salah satu tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman baik secara intern maupun ekstern dari negara tersebut. Melindungi segenap bangsa secara implisit berarti menciptakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk rasa aman dari bencana kebakaran. Dalam sebuah negara, provinsi, kabupaten/kota, eksistensi Dinas Pemadam Kebakaran mutlak diperlukan karena fungsi dari Dinas Pemadam Kebakaran sangat sentral dimana Dinas Pemadam Kebakaran memberikan pelayanan yang sangat urgent dan tidak bisa ditiadakan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan otonomi daerah dalam bidang penanggulangan bahaya kebakaran.

Petugas teknis lapangan atau lebih sering disebut Satuan Petugas (Satgas) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone merupakan ujung tombak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Satgas inilah yang dinilai masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana kebakaran apakah pelayanan yang diberikan sudah optimal atau belum. Petugas teknis lapangan ini juga yang membangun stigma pada masyarakat terhadap kualitas pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan karena petugas teknis lapanganlah yang menentukan buruk atau baiknya kualitas pelayanan yang diberikan.

Institusi Pemadam kebakaran merupakan salah satu organisasi publik yang melayani masyarakat selama 1 x 24 jam sama halnya seperti TNI-POLRI dan Pelayanan Rumah Sakit. Bagi institusi Pemadam Kebakaran tidak mengenal hari libur, baik hari minggu, tanggal merah, ataupun hari besar keagamaan seperti hari raya idul fitri, idul adha, dan hari natal. Guna untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas maka diwajibkan kepada seluruh anggota Pemadam Kebakaran di Indonesia termasuk di Kabupaten Bone agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya penuh tanggung jawab. Jam kerja 1x 24 jam ini merupakan sebuah konsekuensi logis apabila seseorang memutuskan untuk menjadi seorang

Ksatria Biru atau pasukan Yudha Brama Jaya atau yang lebih populer dengan anggota Pemadam Kebakaran.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone pada tahun 2020 telah melaksanakan 5 (Lima) program yang sifatnya supporting program terhadap program utama. Terhadap masing-masing program utama tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.662.371.000,- proporsi realisasi anggaran sebesar 87,21%. Kegiatan pada program ini adalah:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah
 - f. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur dengan anggaran Rp. 531.410.000,- proporsi realisasi anggaran sebesar 74,13%. Kegiatan pada program ini adalah:
 - a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Meubeleur
 - c. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
 - d. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional
3. Program Penunjang Pemerintahan Umum dengan anggaran Rp.7.729.000,- proporsi realisasi sebesar 86,91%. Kegiatan pada program ini adalah Penyusunan Rencana Perangkat Daerah.
4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan anggaran Rp.4.978.490.000,- proporsi realisasi sebesar 94.45%. Kegiatan pada program ini adalah:
 - a. Kegiatan Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - c. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
 - d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Hasil Analisis pencapaian kinerja 4 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone pada Tahun 2020 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran

lembar.....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan Wajib								
1	04			Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
1	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	0	100%	100%	100%	100%	40,49
1	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air dan listrik Yang terbayar	48 Rekening	0	48 Rekening	48 Rekening	100 %	48 Rekening	30,21
1	04	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Service Dan perlengkapan kantor	18 Jenis	0	18 Jenis	18 Jenis	100%	18 Jenis	43,07
1	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Jasa Administrasi dan jasa teknis lainnya yang mendapatkan Jasa keuangan	84 Orang	0	84 Orang	84 Orang	100%	84 Orang	10,69
1	04	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran media yang Menyediakan bahan bacaan	144 Kali	0	144 Kali	144 Kali	100%	144 Kali	65,14

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	04	01	23	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah dan Luar Daerah	Jumlah kegiatan rutin pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar daerah yang diikuti	60 Kegiatan	0	60 Kegiatan	60 Kegiatan	100%	60 Kegiatan	120 Kegiatan	55,17
1	04	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan pendukung Pelaksanaan administrasi perkantoran	60 Paket	0	60 Paket	60 Paket	100%	60 Paket	120 Paket	55,45
1	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	40,00
1	04	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terbangun	1 Unit	0	1 Unit	0	0	1 Unit	0	0
1	04	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pengadaan mobil pemadam kebakaran	2 Unit	0	2 Unit	0	0	2 Unit	0	0
1	04	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 Paket	0	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	10 Paket	40,00
1	04	02	10	Pengadaan Meubeleur	Jumlah Pengadaan mebeleur kantor (unit)	16 Unit	0	16 Unit	16 Unit	100%	16 unit	16 Unit	18,18
1	04	02	22	Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor	9 Kegiatan	0	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100%	9 Kegiatan	17 Kegiatan	34,00
1	04	02	24	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/ operasional rutin selama satu	3 Paket	0	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	6 Paket	40,00
1	04	02	42	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah pekerjaan rehabilitasi gedung Kantor dan posko unit kecamatan	1 Paket	0	1 Paket	0	0	1 Paket	5 Paket	20,00
1	04	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan realisasi pengadaan Kebutuhan penunjang disiplin aparatur	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	17,42
1	04	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian kerja Satgas dan perlengkapannya	237 Lembar	0	237 Lembar	237 Lembar	100%	237 Lembar	237 Lembar	21,72

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	04	03		Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan realisasi kegiatan Penunjang pemerintahan umum	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	2,60
				Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran perangkat daerah yang tersusun	5 Dokumen	0	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	10 Dokumen	34,31
				Pengelolaan website Perangkat Daerah	Jumlah pemeliharaan Website Dinas Pemadam Kebakaran (Paket)	1 Paket	0	1 Paket	0	0	1 Paket	0	0
				Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Kegiatan Promosi dan Pameran Pembangunan yang diikuti (Kegiatan)	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	0	1 Kegiatan	0	0
1	04	19		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	32,28
				Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah dokumen peraturan daerah pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang disusun selama 1 tahun	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	0	0
1	04	19	07	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Dan pencegahan kebakaran	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4,04
1	04	19	08	Kegiatan Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah kegiatan penyuluhan Pencegahan bahaya kebakaran	12 Kegiatan	0	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%	12 Kegiatan	24 Kegiatan	9,90
1	04	19	09	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan bahaya kebakaran yang dipelihara dalam setahun tahun anggaran	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	2 Kegiatan	31,07
1	04	19	12	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah personil satgas pemadam Kebakaran dan jasa teknis lainnya Yang mendapatkan jasa operasional lainnya	3000 kali	0	3000 kali	3000 kali	100%	3000 kali	5884 Kali	41,17
1	04	19	14	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah pengisian tabung APAR pemadam kebakaran	90 tabung	0	90 tabung	42 Tabung	46,67%	90 tabung	112 Tabung	29,76

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Di samping itu, Rencana kerja juga memuat Informasi tentang Program kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya, sehingga akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone.

Penataan kelembagaan dan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 20120 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran yang ditentukan dalam target Renstra terdapat beberapa indikator yaitu Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten dan Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Untuk tahun 2019, cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten adalah sebanyak 6 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yaitu WMK wilayah kota, Kecamatan Tonra, Kecamatan Ajangale, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Ulaweng dan Kecamatan Kahu dengan luas WMK adalah 1350 km², sehingga persentase capaian indikator ini adalah 27,05%.

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba di lokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri. Pada tahun 2019 terjadi kebakaran sebanyak 144 kali kebakaran yang terdiri dari 91 kali didalam WMK dan 53 kali diluar jangkauan WMK. Sedangkan tingkat waktu tanggap yang dipenuhi sebanyak 125 kejadian kebakaran.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Bone

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2019	2021	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	
1	Peningkatan cakupan pelayanan dan kesiagaan pencegahan bahaya kebakaran	-	-	30%	30%	40%	60%	80%	100%	24%	30%	40%	60%	

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara objektif bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone sebagai perangkat organisasi pemerintahan daerah yang antara lain bertugas melayani penanggulangan bahaya bencana kebakaran belum mampu mewujudkan pelayanan prima secara efektif dalam upaya penanggulangan bahaya bencana kebakaran itu sendiri.

Kondisi sekarang menunjukkan bahwa optimalisasi segala sumber daya yang terdapat di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone telah mampu melayani penanggulangan kebakaran di Kecamatan Tellusiattingge, Lappariaja, Tonra, Kahu dan Ulaweng. Pada prinsipnya, efektifitas pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone paling tidak dipengaruhi faktor-faktor berikut ini :

1. Faktor Kapasitas Kelembagaan

Efektifitas pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone mustahil diwujudkan ditengah kapasitas kelembagaan saat ini dan mengingat kondisi geografis Kabupaten Bone dengan luas wilayah 4559 km sudah barang tentu tidak dapat dijangkau secara maksimal dan menyeluruh oleh armada pemadam kebakaran yang berpusat di Kota Watampone. Bahwa dengan jarak tempuh yang harus dilalui oleh armada pemadam kebakaran yang berpusat di kota watampone tentu saja tidak menjangkau dan melayani penanggulangan kebakaran diseluruh wilayah secara efektif dan efisien.

2. Faktor Waktu Tempuh

Waktu tempuh yang digunakan untuk mencapai objek kejadian kebakaran sangat berpengaruh terhadap proses penanggulangan kebakaran dan proses minimalisasi dampak kejadian kebakaran itu sendiri. sebab tingkat kekeringan dan kecepatan angin dapat mengakselerasi besaran kebakaran yang mungkin terjadi. Waktu tempuh itu sendiri dipengaruhi oleh 2 aspek berikut :

- a. Infrastruktur Jalan.
- b. Jumlah dan kualitas Armada Mobil Pemadam.

3. Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia Satgas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone:

- a. Sistem rekrutmen anggota satgas pemadam kebakaran yang tidak teratur.
- b. Sistem pendidikan dan latihan sekedar mengarah pada pembekalan pengetahuan dasar oprasional penanggulangan pemadam kebakaran dan tidak ditujukan pada upaya pembentukan skill individu dan keterampilan

kerjasama kelompok yang mampu menanggulangi kejadian kebakaran secara tepat, cepat dan selamat.

Berdasarkan uraian tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone, maka isu – isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Sumber Daya baik sarana dan prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SPM) sebagai pendukung pelaksana kegiatan.
2. Dibutuhkan kajian tentang bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak lingkungan .
3. Dibutuhkan kajian tentang sistem kehidupan berpolitik , berdemokrasi pada masyarakat Kabupaten Bone,
4. Dibutuhkan kajian tentang penciptaan iklim usaha dan investasi di Kabupaten Bone.
5. Dibutuhkan kajian tentang ikon-ikon unggulan bidang pertanian,perkebunan dan kehutanan.
6. Dibutuhkan kajian tentang teknologi maritim dan budidaya perikanan sebagai potensi ekspor yang mendukung peningkatan kesejahteraan.
7. Dibutuhkan kajian tentang pengembangan klaster inovasi berbasisi produk unggulan Daerah

Program Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone yang akan dilaksanakan untuk tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari hasil analisis kebutuhan program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2022 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdapat beberapa perubahan kegiatan, indikator kinerja, target, dan kebutuhan Dana yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Kebutuhan dana pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp.8.858.239.200,-.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Lembardari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Tanete Riattang	% Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100%	4,073,723,400	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Tanete Riattang	% Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100%	4,073,723,400	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	31.846.800,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah rekening air dan listrik yang terbayar	48 Rekening	54.000.000,00	
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	15.607.800,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	15.607.800,00	
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	16.239.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	16.239.000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,397,839,466,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,397,839,466,00	
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	12 Bulan	3,397,839,466,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	12 Bulan	3,397,839,466,00	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	130.781.614,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	130.781.614,00	
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan per triwulan	4 Paket	3.110.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan per triwulan	4 Paket	3.110.000,00	
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ulaweng	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan	12 Paket	25.048.994,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ulaweng	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan	12 Paket	25.048.994,00	
3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan	12 Paket	6.362.200,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan	12 Paket	6.362.200,00	
4)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan per bulan	12 Paket	22.960.420,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan per bulan	12 Paket	22.960.420,00	
5)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan	12 Paket	11.100.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan	12 Paket	11.100.000,00	
6)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan	12 Paket	5.400.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan	12 Paket	5.400.000,00	
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti oleh Aparat Perangkat Daerah	72 Kegiatan	56.800.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti oleh Aparat Perangkat Daerah	72 Kegiatan	56.800.000,00	

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	185.777.520,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	185.777.520,00	
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah rekening Air, Telepon dan Listrik yang terbayar	48 Rekening	58.733.520,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah rekening Air, Telepon dan Listrik yang terbayar	48 Rekening	58.733.520,00	
2)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah pengisian tabung alat pemadam kebakaran ringan/APAR	60 Tabung	10.080.000,00	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah pengadaan Pakaian Kerja Satgas dan perlengkapannya	250 Pasang	120.000.000,00	
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Orang/Bulan	116.964.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Orang/Bulan	116.964.000,00	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	90 %	327.478.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	90 %	327.478.000,00	
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan terbayar Pajaknya secara rutin/berkala per tahun	17 Unit	49.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan terbayar Pajaknya secara rutin/berkala per tahun	17 Unit	49.000.000,00	
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan terbayar Pajaknya secara rutin/berkala per tahun	16 Unit	268.468.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan terbayar Pajaknya secara rutin/berkala per tahun	16 Unit	268.468.000,00	
3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan per triwulan	21 Unit	10.010.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan per triwulan	21 Unit	10.010.000,00	
II	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	27 Kecamatan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	4.784.515.800,00	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	27 Kecamatan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	4.784.515.800,00	
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	27 Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	4.754.108.400,00	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	27 Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	4.754.108.400,00	
1)	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	27 Kecamatan	Persentase kasus kebakaran yang ditangani	100%	4.717.558.400,00	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Tanete Riattang	Persentase kasus kebakaran yang ditangani	100%	4.717.558.400,00	
2)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	7 Paket	32.400.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	7 Paket	32.400.000,00	
3)	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Kegiatan Bimtek/Diklat peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	2 Kegiatan	4.150.000,00	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Kegiatan Bimtek/Diklat peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	2 Kegiatan	4.150.000,00	

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	27 Kecamatan	Persentase Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	30.407.400,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	27 Kecamatan	Persentase Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	30.407.400,00	
1)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	27 Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	24 Kegiatan	22.250.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	24 Kegiatan	22.250.000,00	
2)	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	27 Kecamatan	Jumlah relawan kebakaran yang dibentuk dan dibina oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	180 Oranng	8.157.400,00	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	27 Kecamatan	Jumlah relawan kebakaran yang dibentuk dan dibina oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	180 Oranng	8.157.400,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pola pikir penyusunan Rencana Kerja diawali oleh kegiatan untuk membuat suatu perencanaan yang melibatkan komitmen dan pengerahan tenaga serta diikuti oleh pengumpulan data dan analisisnya sehingga diperoleh rumusan yang disepakati. Dalam penyusunan renja ini diperlukan tahap perumusan yaitu :

1. Diawali oleh keinginan untuk merencanakan yang diikuti dengan pengerahan tenaga untuk pengumpulan data serta menganalisisnya, sehingga diperoleh rumusan yang disepakati ;
2. Mengimbas tata nilai yang merujuk kepada 5 (lima) prinsip yaitu : kualitas, responsibilitas/tanggap dan bertanggungjawab, mutual/bersama dan saling menguntungkan, efektif dan efisien serta kebebasan/inovasi ;
3. Memformulasi visi dan misi sehingga tergambar tujuan dan saran serta strategi kebijakan yang relevan dengan pelaksanaan dan perubahan ;
4. Menetapkan modal strategis mengikuti sistem, organisasi dan mekanisme yang relevan dengan pelaksanaan ;
5. Berkaca diri untuk menilai kinerja dan membandingkannya dengan sasaran atau keadaan yang ideal berdasarkan pencapaian tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dan ketersediaan sumber daya ;
6. Mengintegrasikan rencana tindakan dalam bentuk program dan kegiatan ;
7. Menyusun skenario alternatif/kemungkinan dengan merujuk kepada hasil analisis SWOT, sehingga ditentukan strategis kebijakan yang tepat berdasarkan kelayakan dari segi sumber daya dan dampaknya ;
8. Implementasi berdasarkan kepada program/kegiatan yang telah ditetapkan termasuk mengembangkan sistem informasi dan peningkatan kualitas sumber daya (peningkatan kemampuan aparat sebagai tujuan antara)

Dari hasil kegiatan Musrenbang kecamatan Kabupaten Bone yang telah lalu, ada beberapa kegiatan yang diusulkan oleh pihak kecamatan terkait dengan program-program atau kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2022 yaitu berupa kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat pada wilayah kecamatan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Desa Bengo, Kec. Bengo	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1 Kali	
2.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Desa Uloe, Kec. Dua Boccoe	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	2 Kali	
3.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Desa Parippung, Kec. Barebbo	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1 Kali	
4.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Desa Allamungeng Patue, Kec. Ajangale	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1 Kali	
5.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Desa Uloe, Kec. Dua Boccoe	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	2 Kali	
6.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Desa Uloe, Kec. Dua Boccoe	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	2 Kali	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, karena pada hakekatnya perencanaan pembangunan nasional merupakan acuan utama bagi setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Arah kebijaksanaan pembangunan daerah kabupaten harus didasari oleh visi dan misi daerah dan output akhirnya berupa pola dasar pembangunan daerah.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam rencana program dan kegiatan didasari kepada melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara. Di sini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berperan serta dalam proses melindungi segenap bangsa dalam penanggulangan bencana kebakaran dan memberikan kenyamanan pada warga dari semua faktor-faktor penyebab bencana kebakaran yang ada di Kabupaten Bone.

Selanjutnya penjabaran program dan kegiatan yang menyangkut penanggulangan bencana kebakaran serta pembangunan baik pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana secara konkrit dituangkan dalam bentuk rencana kerja tahunan dan operasionalnya dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*), dimana penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman ,ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone adalah :

1. Meningkatkan pelayanan publik dalam bidang penanggulangan kebakaran yang cepat dan berkualitas.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan pelayanan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tabel 3.1
MATRIX TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1.	Meningkatkan Sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran	Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran	Persentase peningkatan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah cakupan peningkatan mutu dan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran
2.	Meningkatkan manajemen strategi penanggulangan bencana kebakaran	Meningkatnya manajemen strategi penanggulangan bencana kebakaran	Persentase peningkatan waktu tanggap penanggulangan bencana kebakaran	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase tingkat waktu tanggap kebakaran (respon time rate) maksimal 15 menit - Persentase Cakupan pelayanan bencana

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau Masyarakat, yang akan dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu Program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan Teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Faktor – Faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja tahun 2022 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone tahun 2022, direncanakan terdiri dari 2 Program, 7 Kegiatan, dan 21 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - 3) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - 2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : 1.05.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2023	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1					URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.858.239.200,00				11.511.036.270,00
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				8.858.239.200,00				11.511.036.270,00
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah		100 %	4.073.723.400,00			100 %	4.073.723.400,00
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tanete Riattang	100%	31.846.800,00	APBD		100%	31.604.125,00
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Perangkat Daerah yang tersusun	Kecamatan Tanete Riattang	6 Dokumen	15.607.800,00	APBD		6 Dokumen	24.310.125,00
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kecamatan Tanete Riattang	1 Dokumen	16.239.000,00	APBD		1 Dokumen	7.294.000,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tanete Riattang	100%	3.397.839.466,00	APBD		100%	3.968.627.000,00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
							LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang	12 Bulan	339.7839.466,00	APBD		12 Bulan	396.8627.000,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang	100%	130.781.614,00	APBD		100%	400.408.500,00
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan per triwulan	Kec. Tanete Riattang	4 Paket	3.110.000,00	APBD		4 Paket	16.408.000,00
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan	Kec. Tanete Riattang	12 Paket	25.048.994,00	APBD		12 Paket	60.775.000,00
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan	Kecamatan Tanete Riattang	12 Paket	6.362.200,00	APBD		12 Paket	9.625.000,00
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan per bulan	Kecamatan Tanete Riattang	12 Paket	22.960.420,00	APBD		12 Paket	48.620.250,00
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan	Kecamatan Tanete Riattang	12 Paket	11.100.000,00	APBD		12 Paket	14.586.000,00
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan	Kecamatan Tanete Riattang	12 Paket	5.400.000,00	APBD		12 Paket	7.293.000,00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti oleh Aparat Perangkat Daerah	Kecamatan Tanete Riattang	72 Kegiatan	56.800.000,00	APBD		84 Kegiatan	243.101.250,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tanete Riattang	100%	185.777.520,00	APBD		100%	222.914.420,00
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Air, Telepon dan Listrik yang terbayar	Kecamatan Tanete Riattang	48 Rekening	58.733.520,00	APBD		48 Rekening	68.112.420,00
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengisian tabung alat pemadam kebakaran ringan/APAR	Kecamatan Tanete Riattang	60 Tabung	10.080.000,00	APBD		65 Tabung	24.000.000,00
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Kecamatan Tanete Riattang	12 Org/Bln	152.500.000,00	APBD		12 Org/Bln	130.802.000,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Kecamatan Tanete Riattang	100%	327.478.000,00	APBD		100%	1.005.794.550,00
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan terbayar Pajaknya secara rutin/berkala per tahun	Kecamatan Tanete Riattang	17 Unit	49.000.000,00	APBD		18 Unit	12.647.750,00
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan terbayar Pajaknya secara rutin/berkala per tahun	Kecamatan Tanete Riattang	16 Unit	268.468.000,00	APBD		17 Unit	871.663.800,00
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan per triwulan	Kecamatan Tanete Riattang	21 Unit	10.010.000,00	APBD		22 Unit	12.483.000,00

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	27 Kecamatan	100%	4.784.515.800,00	APBD		100%	5.881.687.675,00
1	05	01	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	27 Kecamatan	100%	4.754.108.400,00	APBD		100%	5.533.268.475,00
1	05	01	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kebakaran yang ditangani	27 Kecamatan	100%	4.717.558.400,00	APBD		100%	4.674.368.475,00
1	05	01	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kecamatan Tanete Riattang	7 Paket	32.400.000,00	APBD		7 Paket	627.375.000,00
1	05	01	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Kegiatan Bimtek/Diklat peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Kecamatan Tanete Riattang	2 Kegiatan	4,150,000	APBD		2 Kegiatan	231.525.000,00
1	05	01	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	27 Kecamatan	100%	30.407.400,00	APBD		100%	348.419.200,00
1	05	01	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	27 Kecamatan	24 Kegiatan	22.250.000,00	APBD		36 Kegiatan	224.868.600,00
1	05	01	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah relawan kebakaran yang dibentuk dan dibina oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	27 Kecamatan	180 Orang	8.157.400,00	APBD		180 Orang	123.550.600,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone Periode Tahun 2022, maka perlu diadakan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone Tahun 2022 yang direncanakan senilai : Rp 8.858.239.200,00.

Berdasarkan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone Tahun 2022, maka perlu direncanakan Sumber Dana Program dan Kegiatan yang dasarnya terdiri dari Program dan Kegiatan Utama yang merupakan program dan kegiatan yang memiliki indikator dan target kinerja utama dalam pencapaian sasaran strategis yang akan dicapai setiap tahunnya untuk mewujudkan tujuan jangka menengah. Program dan kegiatan pendukung merupakan program dan kegiatan rutin (organik) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan utama organisasi yang direncanakan dan sasaran yang ingin di capai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

Secara lengkap, rumusan rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone tahun 2022 kedepannya diperlukan kebijakan anggaran program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone, dengan mempertimbangkan sumber-sumber penganggaran lainnya yang tidak hanya bersumber dari DAU-APBD kabupaten.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang di dalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran. Rencana Kerja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Rencana Kerja ini diharapkan agar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Meskipun disadari, dokumen Rencana Kerja ini jauh dari kesempurnaan namun dengan niat yang tulus dan tekad yang kuat akan memberi keyakinan untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja ini.